

### **Daftar Pustaka**

- D'Souza Anthony. 2009. *Ennoble, Enable, Empower, Kepemimpinan Yesus Sang Almasih*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hartanto Franz Mardi. 2009. *paradigma baru manajemen Indonesia : Menciptakan Nilai dengan Bertumpu pada Kebajikan dan Potensi Insani*. Bandung: Mizan Pustaka
- Hargens Boni. 2006. *Demokrasi Radikal: memahami paradoks demokrasi modern dalam perspektif postmarxis-postmodernis Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe*, Jakarta : Parrhesia,
- Hargens Boni, *Demokrasi Jokowi*, Media Indonesia tanggal 5 November 2014
- Sari Afrina, *Makalah Komunikasi Politik Dan Diplomasi Berbasis Kearifan Lokal (Analisis Pilkada Dalam Proses Kampanye Politik)*
- Sttaratt Robert J. *Menghadirkan pemimpin Visioner : Kiat menegaskan peran sekolah Yogyakarta* Kanisius 2007
- Runtuwene ,Lastiko Runtuwene. 2011. *Kepemimpinan Transformasional Pemimpin Jemaat Belajar Dari Yesus Kristus*, Makalah Disampaikan dalam Pembinaan Pimimpin Umat Paroki Santu Yohanes Rasul Tahuna-Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

### *Endnote*

1. Doa ini yang dipercaya dan diyakini oleh umat kristiani sebagai doa yang diajarkan langsung oleh Yesus kristus kepada dua belas murid. Cerita ini tertuang di dalam kitab perjanjian baru Alkitab Yaitu Kitab Matius pasal 6 ayat 9-13
2. Naskah Asli dari Boni Hargens, *Demokrasi Jokowi*, Media Indonesia tanggal 5 November 2014
3. Mochtar Pabotinggi (1993) dalam *Makalah Komunikasi Politik Dan Diplomasi Berbasis Kearifan Lokal (Analisis Pilkada Dalam Proses Kampanye Politik)* Oleh Dr. Afrina Sari. M.Si



**Aktualisasi Visi Teologi Politik Kristen O. Notohamidjojo  
Bagi Kepemimpinan Bangsa  
Suatu Kajian Reflektif terhadap Kekristenan di Indonesia  
dalam Mewujudkan Negara Pancasila**  
Floeanado Kilanta Sembiring

*"Kelebihan kita orang Kristen adalah berbicara, bicara terlalu banyak.  
Kekurangan kita adalah aksi, perbuatan"*

(Oeripan Notohamidjojo)

**Abstract:**

*This writing is to effort to develop a bridge at upon "the culverts" of space and time between thinking of theological political of O Notohamidjojo in the contemporary christianity context in frame for Pancasila State realization. Pancasila as basic that aim to realize a social order that honour the differentiation, high uphold of unity, honour of human rights and freedom rights and social rights and also upholds social justice which on the line of vision of Kingdom God. In that correlation with christian's calling as citizen of Kingdom of God and Indonesian citizen, the Christianity of Indonesian have role as partner and prophet for every political instrument in Indonesia political produk that created as reflection the aims of Pancasila that in a line with vision of God's Kingdom and to be antithesis of political product that indicated not reflecting aim of Pancasila in Indonesia. The idea of Notohamidjojo is relevan to reappointed in Indonesian context that always to experience social change and the challenge especially for leadership of church and state for realization the task and responsibility.*

**Keywords:** *O. Notohamidjojo, theological political, Pancasila, Indonesia, Indonesian christianity, Kongdom of God, leadership of church and state.*

**Pendahuluan**

Enam belas tahun sudah Indonesia hidup di era reformasi di mana Demokrasi mulai nyata: kebebasan berpendapat, hak-hak politik dan kedaulatan rakyat telah diakui. Setiap orang dapat berpartisipasi dalam

dunia politik dan bebas mengutarakan sikap dan pandangannya. Namun hal tersebut mengandung paradoks-paradoks didalamnya. Publik mendapat informasi seluas-luasnya terhadap kebijakan-kebijakan dan produk-produk politik yang dikeluarkan serta dapat mengkritisnya secara terbuka, di sisi lain perilaku-perilaku politik para pejabat publik dan kader-kader politisi sering kali bertolak belakang dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila sebagai asas moral politik dan fondasi tujuan negara.

Kurun waktu 2004 sampai kini Paling tidak hampir 3000 anggota DPRD (tepatnya 2.545 orang) terjerat hukum yang sebagian besar kasus korupsi. Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 318 Kepala Daerah dari 524 orang Kepala Daerah terjerat korupsi, belum lagi para pejabat di tingkat pusat dan daerah, sejumlah Menteri juga terjerat, disamping beberapa pimpinan partai (Andi Bahtiar Hamzah, Malaranggeng, Lutfi Hasan Ishak, Anas, Jero Wacik, Suryadharma Ali dan lainnya).<sup>1</sup> Jaksa Urip Tri Gunawan, Jaksa Cirus sinaga, Akil Mochtar (Ketua Mahkamah Konsistusi) yang ditangkap karena kasus suap dan Irjen Pol. Djoko Susilo yang ditangkap karena kasus korupsi simulasi SIM memperlihatkan aparatur penegak hukum yang diharapkan sebagai penjaga dan benteng terakhir Demokrasi Pancasila juga tidak berbeda jauh perilakunya dengan yang lain. Media massa yang digadang-gadang menjadi pilar ke empat fondasi Demokrasi Pancasila malah menjadi alat propoganda dan pencitraan seglinter "elite" politik. Sebagaimana misalnya TV One yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie dan Metro TV yang dimiliki oleh Surya Paloh, selama Pemilu 2014 pemberitaan kedua TV tersebut berat sebelah terhadap kandidat presiden yang di usung oleh partai dan koalisi mereka masing-masing.

Nampaknya bangsa "religius" yang menjadi identitas Negara ini berbanding terbalik dengan sikap, perilaku pemeluknya yang juga para pejabat publik dan kader-kader politisi. Masifnya fenomena beragama sejalan dengan tingginya angka para pejabat publik dan kader politisi yang perilaku politiknya kontradiktif dengan nilai-nilai keagamaan dan asas moral politik negara ini, tentu sangat ironis. Atau mungkin agama bersikap acuh terhadap realita ini karena merasa bukan sebagai "duniannya" (apolitis) dan takut terjebak dalam kotak sinkretisme. Pertanyaan yang muncul ialah sampai kapan institusi beragama diam melihat realita yang kontradiktif dengan nilai-nilainya atau apakah agama yang menjadi pandangan dunia yang mempengaruhi sikap, pandangan dan perilaku pemeluknya mengecualikan dunia politik serta perubahan-perubahan sosial yang menghambat terwujudnya Negara Pancasila.

Sepertinya apa yang dikatakan Setyo Wibowo benar, sikap transaksional dan legalistik dalam beragama merupakan salah satu alasan perilaku politik para pejabat publik dan kader politisi bertentangan dengan asal moral politik bangsa ini,<sup>2</sup> dan pada akhirnya menghambat terwujudnya Negara Pancasila.

Melihat fenomena ini, pemikiran-pemikiran teologi politik Oeripan Notohamidjojo bisa dijadikan jalan keluar ditengah "kebingungan" kekeristenan (gereja) sebagai salah satu agama di Indonesia yang ikut bertanggungjawab atas realita yang terjadi di Indonesia dewasa ini, sehingga bisa turut berperan aktif dalam mewujudkan Negara Pancasila. Notohamidjojo melihat nilai-nilai Kerajaan Allah yang menjadi inti Injil memiliki korelasi dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang memungkinkan kekeristenan (gereja) untuk ikut berperan aktif dalam mewujudkan Negara Pancasila. Tulisan ini terbagi atas empat bagian yang saling berhubungan. Pertama, (1.2.) politik Indonesia dari kacamata Notohamidjojo, kedua (1.3.) Pancasila dan Kerajaan Allah Menurut Notohamidjojo, (1.4.) ketiga Politik Kerajaan Allah Notohamidjojo, ke empat (1.5) aktualisasi visi teologi politik Notohamidjojo dalam mewujudkan Negara Pancasila serta implikasinya terhadap kepemimpinan bangsa, dan tulisan ini ditutup dengan kesimpulan.

Tulisan ini berupaya menunjukkan pentingnya peran agama, dalam hal ini kekeristenan dalam mewujudkan Negara Pancasila dan aktulitas pemikiran-pemikiran teologi politik kristen O. Notohamidjojo bagi kekeristenan masa kini.

### **Politik Indonesia dalam Kaca Mata Notohamidjojo.**

Dalam kurun waktu belakangan ini animo masyarakat terhadap politik tiba-tiba membesar. Hal itu mulai dilihat pada bagaimana percakapan politik begitu menjamur di setiap elemen masyarakat. Dari seminar-seminar yang bersifat formal sampai percakapan ringan di kedai kopi.

Lembaga-lembaga keagamaan juga mengambil bagian di dalam percakapan politik di Indonesia. Beberapa gereja terlihat aktif melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk *workshop* atau seminar politik untuk warga jemaatnya, secara khusus menjelang pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden di Indonesia. Terlepas dari segala macam motivasi dibalik perbincangan politik tersebut, lambat laun setiap element masyarakat di Indonesia sudah mulai sadar bagaimana pilihan dan

orientasi politik mereka dapat mempengaruhi kehidupan mereka untuk jangka waktu yang lama.

Pertanyaan yang muncul ketika kekeristenan di Indonesia mulai berbicara mengenai politik ialah politik yang bagaimana yang akan diperankan kekeristenan di Indonesia. Apakah kekeristenan akan berorientasi pada politik yang sekular atau memberi corak kekeristenan di dalamnya. Pada akhirnya jawaban-jawaban akan pertanyaan tersebut akan menjawab seperti apa peran kekeristenan di Indonesia.

Dalam mendefenisikan politik, Notohamidjojo sepaham dengan W. Banning dalam *Encyclopedisch Handboek van moderene denken* yang merumuskan politik sebagai sebuah praktek untuk memimpin kekuatan-kekuatan yang ada pada masyarakat yang kompleks dan dinamis dengan menggunakan pemerintahan negara<sup>3</sup>. Sebagai sebuah praktek, politik memiliki unsur kepentingan, ilmu, kekuasaan, kesadaran hukum dan keadilan, penguasaan terhadap instrumen-instrumen politik dan yang terakhir ialah visi terhadap manusia yaitu penghargaan terhadap eksistensi manusia yang mencakup hak asasi manusia, hak-hak akan kebebasan dan hak-hak sosial sebagai warganegara yang menjadi batas dari kekuasaan negara<sup>4</sup>.

Jika melihat konteks politik Indonesia sekitar tahun 1948-1967, adalah wajar ketika Notohamidjojo mendefenisikan politik sebagai usaha pemerintah untuk memimpin kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Pada periode tersebut kekuatan-kekuatan yang dinamis dan kompleks tersebut dapat dikategorikan ke dalam empat kekuatan, tepatnya empat kekuatan politik yang dapat menentukan keadaan negara pada saat itu, yaitu kelompok nasionalis, kelompok Islam, kelompok komunis dan kelompok militer.

Notohamidjojo menyadari bahwa Indonesia akan mengalami hambatan yang besar dalam mewujudkan cita-citanya bila kekuatan-kekuatan tersebut tidak dapat diselaraskan dalam kepentingan-kepentingan-nya menjadi kepentingan bersama. Pemerintah dengan segala kemampuan dan wibawanya harus bisa memimpin kekuatan-kekuatan politik tersebut untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok masing-masing. Sewaktu upacara Dies Natalis X UKSW tahun 1966 Notohamidjojo berkata :

*"Yang paling penting untuk untuk memanusiation manusia di Indonesia ialah: 1. Mengakhiri semua pertengkaran dan perselisihan politik, menggalang perdamaian politik (politieke vrede)..."*<sup>5</sup>

Nampaknya Notohamidjojo melihat Kejadian "Affair Madiun" pada

tahun 1948 oleh PKI, ketidaksetabilan politik pada masa Demokrasi Liberal, pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah, konflik internal Militer dan Gestapu sebagai akibat dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kekuatan-kekuatan (terutama kekuatan politik) yang dinamis dan kompleks di dalam masyarakat, hal itu akhirnya berimbas pada rakyat

Jika melihat dari sejarah negara ini, Politik memang memiliki dua sisi yang saling berlawanan. Pada satu sisi politik dapat membawa kesejahteraan yang menyeluruh, baik kesejahteraan jasmani dan kesejahteraan dalam pemenuhan eksistensi, sedangkan di sisi lain politik dapat menyebabkan kehancuran serta perendahan terhadap eksistensi manusia yang merupakan subjek pelaku sekaligus subjek penerima dari produk politik yang dihasilkan. Notohamidjojo mengatakan :

*"Tanpa mempersoalkan apakah terdjemahan itu menurut Cullman, itu benar atau salah, kita tidak dapat memperhitungkan, bahwa penguasa seperti rakjat, terdiri dari manusia jang berdosa, sehingga dapat berdjiwa mendua, bahkan dapat merosot mendjadi alat kerajadjaan kegelapan"*<sup>6</sup>.

Meskipun demikian politik tetap memiliki peran yang tidak dapat dihilangkan dalam kehidupan bernegara sehingga diperlukan suatu dasar yang akan menjaga politik tetap pada sisi yang positif. Dalam menjaga politik tetap positif maka perlu dasar yang berfungsi sebagai pijakan atau pengontrol politik dalam menghasilkan produk-produk politik yang mendukung tujuan negara. Dalam konteks politik di Indonesia, dasar tersebut ialah Pancasila. Pancasila sebagai dasar berfungsi untuk menjaga setiap perilaku dan produk politik di Indonesia ada untuk mewujudkan tujuan bangsa ini, yaitu Negara Pancasila. Notohamidjojo mengatakan:

*"Usaha itu menuntut daripada penafsiran Pancasila, Demokrasi Pacasila, Negara Hukum dan UUD 1945 sebagai dasar, kader dan tujuan bagi pembangunan negara modern. Penafsiran dari unsur-unsur itu (dasar, kader dan tujuan) harus kita perjuangkan sehingga memperoleh konsensus dari semua pihak"*<sup>7</sup>.

Hal tersebut menunjukkan, Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila, menjadikan Pancasila itu sendiri sebagai acuan/dasar politik Indonesia. Ketika Pancasila dijadikan sebagai dasar, maka setiap produk dan perilaku politik di Indonesia harus mencerminkan tujuan Pancasila. Jika tidak demikian, secara tidak langsung perilaku politik dan produk politik yang dihasilkan tidak dapat dibenarkan serta perlu dipertanyakan.

## **Pancasila dan Kerajaan Allah Menurut Notohamdjojo**

Bagaimanapun, tidak ada defenisi agama yang umum. Setiap agama memiliki karakteristiknya masing-masing yang menyebabkan pemeluknya memiliki pemaknaan dan sudut pandang yang berbeda mengenai agama. Tanpa bermaksud jatuh ke dalam perelatifan teologis agama-agama di Indonesia dan menempatkan kekeristenan pada posisi *superior*, evaluasi teologis Kristen terhadap Pancasila sebagai dasar perwujudan Negara Pancasila bertujuan untuk melihat bagaimana sikap kekeristenan terhadap Pancasila sebagai dasar dan tujuan bangsa ini sebelum menentukan peran apa yang bisa diambil oleh kekeristenan di Indonesia dalam keikutsertaanya mewujudkan Negara Pancasila.

Penyempitan makna Pancasila sebagai ideologi negara yang hanya mengatur mekanisme ketatanegaraan Bangsa Indonesia merupakan bentuk pendangkalan makna dari Pancasila itu sendiri. Pancasila lebih dari sekedar Ideologi Negara, Pancasila juga merupakan dasar yang mengandung nilai, norma, jati diri dan karakter bangsa ini. Pancasila tidak pernah ditemukan atau diciptakan akantetapi di gali dari keluhuran dan kearifan budaya serta keyakinan di Indonesia, sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai *Filosofische Granslag* dan *common platfrom* seluruh warga negara Indonesia. *Core value* tersebut tercantum di setiap sila. sebagai sebuah dasar, Notohamdjojo Mengatakan Pancasila merupakan norma formil yang merangkumkan secara genital cita-cita nasional yaitu Negara Pancasila<sup>8</sup>. Yang dimaksud sebagai Negara Pancasila ialah :

*“Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusjawaratan/ perwakilan adalah kerakjatan yang ber-Ketuhanan Jang Maha Esa, jang berkemansuiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia”<sup>9</sup>.*

Dari rumusan tersebut, maka Pancasila sebagai dasar bertujuan untuk menciptakan sebuah realitas sosial yang menghargai kemajemukan, terkhususnya kemajemukan agama melalui toleransi dan kebebasan berkeyakinan, menciptakan negara demokrasi yang berlandaskan keadilan yang melindungi hak-hak asasi mansuia. Dasar itu juga menjamin pelaksanaan hukum yang tidak memihak, menjaga identitas persatuan sebagai Bangsa Indonesia dan menjunjung keadilan sosial di setiap segi kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat identitas primodial yang melekat pada dirinya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial<sup>10</sup>.

Dari penafsiran Notohamidjojo terhadap Pancasila, tampak jelas

Pancasila memiliki tujuan yang luhur dan mulia. Tujuan yang adalah menciptakan realitas sosial yang menjunjung tinggi kebersamaan/persatuan tanpa mengenyampingkan kebebasan individu, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, toleransi, tenggang rasa, cinta kasih dan menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Dengan begitu, Negara Pancasila dapat terwujud sepenuhnya.

Dan tujuan Pancasila sejalan dengan tugas dan panggilan Gereja, yaitu menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di dunia. Kerajaan Allah (Yunani: *basileia tou theou*) memiliki tiga dimensi historis, yaitu dimensi masa lalu (*past*) melalui kehadiran dan karya Yesus di dunia, dimensi kekinian (*present*) melalui tugas dan panggilan gereja sebagai tubuh Kristus, dan dimensi masa depan (*future*) melalui kehadiran pemerintahan langsung Allah di dunia.

Dalam dimensi kekiniannya (*present*) Kerajaan Allah memiliki arti yang dinamis ketimbang arti statis. Allah meraja dalam tindakan-tindakanNya yang penuh kuasa, Allah meraja dalam kerangka pembangunan atau perubahan positif yang berkaitan dengan tata realitas yang ada. Pemahaman Kerajaan Allah sebagai suatu hal yang dinamis dan berkaitan dengan tata realita menjadikan Kerajaan Allah sama dengan transformatif sebuah situasi yang buruk dan menghapuskan situasi yang menindas manusia. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus merupakan bentuk konkret dari kehadiran Allah ditengah-tengah situasi historis, dimana Ia merupakan perjuangan melawan kuasa anti-Kerajaan Allah yang mewujudkan dalam segala bentuk peminggiran, pembawahan dan pengabaian sesama manusia<sup>11</sup>.

Sedangkan Choan-Seng Song menggunakan istilah pemerintahan Allah (*Reign of God*) untuk menjelaskan kedinamisan dari inti pewartaan Yesus (Kerajaan Allah), dimana dalam Pemerintahan Allah yang dinamis dan historis terletak kebenaran Allah yang menjadi pokok dari pewartaan Yesus. Kebenaran dari Pemerintahan Allah tersebut ialah kebenaran yang memerdekakan, memerdekakan manusia dari rasa takut, memerdekakan mereka dari penindasan, memerdekakan mereka dari politik yang menyangkal hati nurani rakyat dan hak-hak mereka. Kerajaan Allah ialah keadilan Allah yang dihadirkan di dalam Pemerintahan Allah. Keadilan Allah ada untuk mereka yang miskin, tidak berdaya, terdiskriminasi, terpinggirkan dan di adili dengan takaran yang tidak sesuai dengan hakekat kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang terdapat di dalam Pemerintahan Allah yang diwartakan oleh Yesus merupakan kebenaran

yang lebih dalam, kebenaran yang menyentuh dasar-dasar keberadaan manusia dan melayani hubungan antara Allah dan umat manusia. Kebenaran-Nya berasal dari kasih yang berada di dalam jantung Pemerintahan Allah<sup>12</sup>.

Tidak berbeda jauh dengan pemikiran Hartono Budi dan Choan-Sheng Song mengenai Kerajaan Allah, Notohamidjojo juga memahami Kerajaan Sorga/Allah sebagai yang dinamis dan historis. Notohamidjojo memandang Kerajaan Sorga/sAllah bukan hanya memiliki segi eskatologis belaka, suatu hal yang di nanti dan belum hadir<sup>13</sup>. Kerajaan Allah adalah suatu hal yang historis, terkoneksi dengan kehidupan manusia dan segala realita sosialnya. Bagi Notohamidjojo Kerajaan Allah ada untuk memberi kebenaran, keadilan dan kasih bagi manusia di setiap segi kehidupan manusia melalui orang dan komunitas kristen sebagai warga Kerajaan Allah<sup>14</sup>. Notohamidjojo mengatakan:

*“Kerajaan Surga itu akan merupakan Kerajaan yang berkeadilan ekonomi dan berkeadilan sosial. Sebab itu kita wajib menjegerakan tertjapainya keadilan ekonomi dan keadilan sosial...kerajaan Allah itu mewujudkan Kerajaan yang berkeadilan diantara bangsa-bangsa...sebab itu kita wajib menolak segala radiskiriminasi... kerajaan Allah itu mewujudkan Kerajaan yang berkeadilan politik. Sebab itu kita wajib berdjung dengan sekuat tenaga untuk memperoleh dan merebut hak-hak politik untuk memperoleh hak-hak asasi, hak-hak kebebasan fundamental dan hak-hak sosial bagi seluruh manusia dalam negara....”<sup>15</sup>*

Notohamidjojo melihat tujuan dari kekeristenan di dunia (secara personal maupun persekutuan seperti gereja) ialah menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di dalam dunia, agar kebenaran, keadilan dan kasih dapat dirasakan oleh setiap umat manusia dan dinyatakan di setiap bagian kehidupan manusia. Imamat Rajani yang diamanatkan kepada kekeristenan tersebut berlaku di setiap dimensi kehidupan termasuk di dalam kehidupan bernegara, di mana dalam kehidupan bernegara, kekeristenan menempatkan diri-nya sebagai nabi dan mitra pemerintah yang menyuarakan dan mewujudkan kebenaran, keadilan dan kasih dalam bentuk karya nyata.

Dari sudut pandang Notohamidjojo, Pancasila mengandung nilai-nilai Injil di dalamnya. Baginya, Nilai dan ajaran kekeristenan sekiranya tidak dipahami sebagai jembatan untuk menuju Kerajaan Sorga saja, tentunya hal tersebut merupakan bentuk pendangkalan teologis terhadap nilai Injil dan ajaran kristen. Nilai Injil dan ajaran kristen memiliki dampak historis yang berhubungan langsung dengan realita sosial yang ada

disekitarnya. Abraham Kuyper, seorang negarawan Belanda dan pemikir Calvinis, yang pemikirannya banyak mempengaruhi pemikiran Notohamidjojo mengatakan:

*"orang percaya memiliki mandat Ilahi untuk menjadi Hamba Kristus dalam setiap aspek kehidupan.... Orang Kristen harus berusaha mengintergrasikan norma-norma skriptural dengan realitas-realitas kehidupan publik"<sup>16</sup>.*

Melalui Pengintegrasian norma-norma skriptural dengan realitas-realitas publik, akan memberikan makna teologis di setiap pergumulan sosial yang dilakukan oleh kekeristenan. Posisi kekeristenan di Indonesia sebagai bagian dari kenyataan sosial dan kehidupan sosial memperkuat argumen bahwa kekeristenan memiliki tanggungjawab penuh untuk mengambil posisi terdepan dalam menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah melalui penegakan dan pewujudan kebenaran, keadilan dan kasih, dalam konteks Negara Indonesia termasuk keterlibatan dalam mewujudkan Negara Pancasila. Notohamidjojo mengatakan:

*"...Kerajaan Allah itu, apabila kita kini benar-benar gereja dan warga gereja, mendorong kita untuk berbuat dan bergiat membaharui manusia, masyarakat dan kebudayaan..."<sup>17</sup>*

Jelas, kritikan politik minoritas-eksklusif, penggambaran *complex-minority-mentality* dan menciptakan getho-sosial yang isolatif yang ditujukan kepada pemikiran-pemikiran Notohamidjojo oleh beberapa kritikus tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Notohamidjojo mencoba menghilangkan label "*londo ireng*" yang lama melekat pada diri kekeristenan di Indonesia karena sifat "pietis", sehingga kekeristenan di Indonesia bersikap pasif dan kaku dalam panggung bernegara. Notohamidjojo tidak membenarkan dikotomi mayoritas-minoritas yang berdasarkan label primordialitas di Indonesia. Notohamidjojo dalam pemikiran teologi politiknya membuktikan kekeristenan Indonesia merupakan bagian yang integral dengan negara ini, dan nilai-nilai yang dianut kekeristenan mendukung kesatuan dan tujuan bersama Bangsa Indonesia. Notohamidjojo mengatakan:

*"Pemribumian Theologia di Indonesia berarti bahwa Theologia sebagai ilmu tentang refelasi Allah, dipanggil untuk mengungkapkan sebenar-benarnya dan sesetia-setianya, Injil Kerajaan Allah dalam bahasa, matra, pemikiran, pola kebudayaan Indonesia dan perbuatan diakonia kepada manusia Indonesia dalam kondisi masyarakat dan kebudayaannya yang mendidih secara revolusioner mengkhawatirkan ini...maksud pemribumian Theologia ialah membuka mata, mengkritik dan mengoreksi Gereja dalam pelaksanaannya untuk merangsang pembaharuan manusia Indonesia dan transformasi masyarakat..."<sup>18</sup>.*

Hal itu juga tidak terlepas dari bagaimana masyarakat Indonesia memandang agama. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, agama (dogma, doktrin, norma, moral dan nilai-nilai) adalah *weltanschauung*. Sebagai pandangan dunia (*weltanschauung*), manusia dan masyarakat Indonesia menjadikan agama sebagai nilai fundamental yang mendasari dan mengarahkan seluruh kehidupannya. Hal tersebut dapat di lihat pada Pancasila, di mana sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan maksud untuk menyinari ke empat sila lainnya. Notohamidjojo menyadari hal tersebut sehingga ia mengingatkan kekristenan di Indonesia bahwa kita merupakan bagian yang integral dari bangsa ini. Notohamidjojo menegaskan bahwa label “*londo ireng*” yang ditujukan kepada kekristenan di Indonesia tidak benar. Notohamidjojo lalu berusaha “mempribumikan” (kontekstualisasi) nilai-nilai kekristenan ke dalam konteks Indonesia, terkhususnya dalam konteks bernegara.

### **Politik Kerajaan Allah Notohamidjojo: Peran Kekristenan di Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Pancasila.**

Kerajaan Allah bukan hanya milik gereja yang hanya terkoneksi dengan “dunia” gereja saja. Mengurung Kerajaan Allah di dalam gereja sama saja mengingkari eksistensi dari Kerajaan Allah yang diwartakan Kristus. Kekristenan dengan segala spektrumnya memang tidak berasal dari dunia tetapi tidak berarti terasing dari segala realitas sosial yang ada di dunia, malah harus menerangi dunia dengan segala realitas sosialnya termasuk politik. Notohamidjojo mengatakan:

*“...kita menginsyafi kekristenan yang revolusioner dan berbuat serta bertindak dengan program kerja di bidang: kegerejaan, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan (ilmu, seni, pendidikan)...”<sup>19</sup>*

Bagi Notohamidjojo dunia politik juga tidak terlepas dari tugas dan panggilan kekristenan. Kewibawaan Hukum dan Nilai-Nilai Kerajaan Allah mencakup semua bidang dan komponen hidup manusia, tanpa terkecuali. Allah bukanlah Allah di Sorga saja, Allah ada bagi dunia agar karyaNya nyata. Di dalam bidang politik kekristenan harus bersaksi danewartakan Injil Kerajaan Allah melalui perilaku dan tindakan politiknya. Keberadaan kekristenan di dalam bidang politik merupakan tugas dan panggilan kekristenan. Kekristenan ada di dalam politik untuk “menggarami” dan melakukan transformasi yang terus menerus dan dinamis dalam mengupayakan *kerugma* (memproklamasikan Kerajaan Allah) yang dilandaskan *agape* (kasih yang mengorbankan diri untuk sesama), *a-letheia* (kebenaran yang sebenar-benarnya) dan *dikajosune*

(keadilan yang dijiwai)<sup>20</sup>. Notohamidjojo mengatakan :

*"dalam Kerajaan Allah ada Tsedaka, keadilan; kita wajib berusaha sekuat tenaga supaya mengembangkan keadilan sekuat tenaga supaya mengembangkan keadilan didalam masyarakat kita sekarang...dalam Kerajaan Allah ada syaloom. Kita dipanggil untuk membanting tulang mewujudkan damai, keutuhan dan bahagia antara sesama kita, bukan nanti atau besok, melainkan sekarang...."*<sup>21</sup>

Politik Kerajaan Allah dapat dipahami sebagai nilai, perilaku, sikap dan tujuan Kekeristenan berpolitik. Perilaku dan sikap yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kasih dalam berpolitik pada akhirnya mendukung terciptanya sebuah tatanan sosial yang benar, adil dan penuh kasih sebagai wujud kehadiran tanda-tanda Kerajaan Allah di dunia. Politik Kerajaan Allah tidak bertujuan menghadirkan Kerajaan Allah dalam bentuk teritori, karena itu bukan panggilan dari kekeristenan di utus ke dunia. Politik Kerajaan Allah ada untuk mewujudkan dan menjaga agar perilaku politik dan produk politik yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kerajaan Allah. Notoamidjojo mengatakan:

*"Kita harus mengidentifikasikan diri, menyaturagikan diri dengan penderitaan dalam masyarakat kita, kita harus menyusun program kerja, program aksi...kita dipanggil untuk berbuat, untuk melayani, untuk melawan dan membuang setan dan roh kegelapan, yang mempergunakan kegiatan kerja untuk menentang Terang Kerajaan Surga...kita mengira bahwa sudah memadai, jikalau kita bersama-sama dengan Kristus dan pergi mengajar orang. Belum cukup...kita harus membuang setan, kita harus mentransformasikan dunia. Kita harus membaharui bidang kegerejaan, bidang politik, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang kebudayaan (ilmu, kesenian, pendidikan). Bagi orang Kristen bidang-bidang itu tidak terpisahkan daripada koionia (persekutuan dengan Kristus) dan kerugma (proklamasi Kerajaan Sorga). Pemisahan pelayanan (diakonia) dalam bidang-bidang tersebut dari koionia dan krugma, bertentangan dengan panggilan tri-tunggal daripada orang Kristen"*<sup>22</sup>.

Kerajaan Allah bukanlah Kerajaan untuk diriNya sendiri melainkan Kerajaan yang terbuka yang memproklamirkan kesetaraan, kesalingan dan timbal balik di dalam sebuah relasi sosial yang baik pula. Komunitas Kristen memiliki peran sebagai mitra Allah untuk menciptakan sebuah realita sosial (persekutuan sosial) yang dilandasi oleh kasih, kebebasan, keadilan dan kebenaran. Komunitas Kristen tidak mencoba untuk merelatifkan kepelbagaian yang ada pada dirinya sebagai manusia dan

sesamanya dengan cara apapun, menjunjung tinggi keadilan dan ada untuk menciptakan realita (persekutuan) sosial seperti yang ada di dalam Kerajaan Allah<sup>23</sup>.

Maka, dalam mewujudkan Negara Pancasila melalui korelasinya dengan Kerajaan Allah, perilaku dalam berpolitik dan produk politik yang dikeluarkan harus mendukung terciptanya Negara Pancasila. Perilaku dan produk politik yang menghargai kemajemukan, menjamin kebebasan dan keadilan, menghargai hak-hak asasi manusia dan menjunjung tinggi keadilan sosial tanpa melihat identitas primordial yang melekat pada rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan di Indonesia, agar terwujud sebuah tatanan sosial yang benar, adil dan penuh kasih di Indonesia. Notohamidjojo Mengatakan:

*Dunia, yaitu masyarakat dan kebudayaan Indonesia, harus kita masuk dengan bebas dan berani untuk mengekspresikan di dalamnya dengan kata dan perbuatan kerugma Kerajaan Allah. Pengungkapan itu kita laksanakan dalam bahasa dan matra kebudayaan Indonesia dan perbuatan pelayanan yang konkrit untuk menanggapi krisis, kekacauan dan penderitaan manusia Indonesia. Pengungkapan kita lakukan dalam kuat kuasa Roh Kudus, yang dapat menimbulkan perhubungan--perhubungan baru dalam bidang religi dan agresinya, akhlak dan kemerosotannya, ideologi dan perebutan kekuasaan, politik dan pertentangan kepentingannya, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, untuk memberikan makna, arah dan harapan, kepada tata baru dari pada Kerajaan Allah".<sup>24</sup>*

Notohamidjojo juga mengatakan:

*"...pentafsiran Pancasila yang Theoanthropocentis menginginkan... membudayakan manusia dalam masyarakat yang bertanggungjawab, dimana kekuasaan politik, ekonomi, kebudayaan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan sesama...."<sup>25</sup>*

Jelas, nilai-nilai Kerajaan Allah sejalan dengan terwujudnya Negara Pancasila di Indonesia. Disamping itu, bagi Notohamidjojo kekeristenan sebagai warga Kerajaan Allah dan mitra Allah di Indonesia memiliki panggilan untuk mendukung dan mengawal terwujudnya Negara Pancasila di Indonesia sebagai bentuk pemenuhan panggilannya dalam menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di Indonesia, dengan ikut berpartisipasi mengawal dan menghasilkan produk politik yang mendukung Pewujudan Negara Pancasila, dan menjadi antitesis bagi perilaku dan produk politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kerajaan

Allah yang menghambat terwujudnya Negara Pancasila di Indonesia.

### **Aktualisasi Visi Teologi Politik Notohamidjojo dalam Mewujudkan Negara Pancasila Serta Implikasinya terhadap Kepemimpinan Bangsa.**

Pembahasan diatas, penulis telah menjelaskan pemikiran teologi politik Kristen O. Notohamidjojo yang berlandaskan inti pewartaan Yesus, yaitu Kerajaan Allah serta korelasinya dengan Pancasila sebagai tujuan. Pada bagian ini penulis akan mencoba mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran tersebut dengan pendekatan deduktif-normatif untuk menunjukkan bagaimana pemikiran-pemikiran teologi politik Notohamidjojo masih sangat relevan untuk direfleksikan oleh kekeristenan di Indonesia dalam ikut berperan aktif mewujudkan negara Pancasila, serta implikasinya terhadap kepemimpinan bangsa.

Saat jatuhnya rezim orde baru (orba) yang ditandai dilengserkannya Soeharto oleh mahasiswa dan kalangan menengah, Indonesia masuk ke dalam era reformasi sebagai konsekuensi logisnya. Pada era reformasi muncul harapan akan Indonesia tanpa tirani, kolusi, korupsi, nepotisme (KKN), Indonesia yang menghargai kebebasan berkumpul dan berpendapat, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Era reformasi juga memberi harapan akan pengakuan hak-hak politik rakyat dan Indonesia yang perilaku ekonominya berpihak terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam kata lain, harapan akan terwujudnya Negara Pancasila yang sesungguhnya di Indonesia.

Salah satu indikasi yang menunjukkan Negara Indonesia sudah betul-betul berjalan pada rel yang benar menuju tujuannya dalam mewujudkan Negara Pancasila ialah adanya sistem *chek and balance* diantara tiga pilar negara demokrasi, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sistem tersebut menjaga agar tidak ada lembaga yang lebih mendominasi daripada lembaga lainnya, dan untuk menghindari kekuasaan yang deposit maupun sistem pemerintahan yang autokrasi<sup>26</sup>. Pengalaman negara ini pada era orba menunjukkan Negara Pancasila hanyalah sebuah delusi karena tidak adanya *chek and balance* diantara ketiga lembaga utama tersebut. Ketiga lembaga tersebut pada rezim orba hanya ada untuk memenuhi kepentingan dan tujuan penguasa bukan tujuan negara ini.

Nampaknya Negara Pancasila yang diharapkan pasca orba belum sepenuhnya terwujud. Enam belas tahun sudah Indonesia hidup di dalam era reformasi tetapi perilaku politik orba masih dapat ditemui saat ini. Era reformasi yang mau membangun Negara Pancasila beserta harapan-harapannya pada kenyataannya tidak berjalan dengan benar. Semakin

banyaknya tingkat kekerasan dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama, Sikap koruptif, kolusi dan nepotis para pejabat negara dan tokoh partai, praktik politik uang. Media massa yang diharapkan menjadi pilar keempat dalam mewujudkan Negara Pancasila malah menjadi alat propaganda sekelompok orang maupun golongan dan hak politik rakyat dalam menentukan pemimpinnya-pun coba dihilangkan. *trias politica* yang diharapkan menjadi kendaraan bangsa ini dalam mewujudkan Negara Pancasila malah menjadi *trias corruptiva* yang menghambat terwujudnya Negara Pancasila.

Tanggapan tersebut tidak muncul tanpa alasan, selama enam belas tahun pasca jatuhnya orba, Indonesia banyak mengalami kekerasan dan pelanggaran akan kebebasan beragama seperti yang dialami Ahmadiyah, Syiah, GKI Yasmin dan ketidakberpihakan pemerintah terhadap mereka, kasus korupsi yang banyak menimpa para anggota legislatif, kader partai dan pimpinan partai politik. Korupsi, kolusi dan sikap nepotis para pejabat negara dan daerah yang terus menunjukkan angka yang tidak sedikit. Penegak hukum yang tersangkut skandal suap dan penyalahgunaan wewenang, media massa serta lembaga-lembaga survei yang menjadi alat propaganda para politikus materialistis tampak jelas keberadaannya pada Pemilu 2014 dan UUD Pilkada yang mencoba menghilangkan hak politik rakyat. Fenomena tersebut merupakan bentuk nyata yang mengindikasikan belum terwujudnya dan besarnya hambatan dalam mewujudkan Negara Pancasila.

Tampaknya label bangsa "religius" yang menjadi identitas negara ini berbanding terbalik dengan sikap dan perilaku politik para pemeluknya. Masifnya fenomena Beragama sejalan dengan tingginya tingkat KKN, kekerasan dan pelanggaran akan kebebasan berkeyakinan, serta perilaku politik para kader partai yang berorientasi pada kekuasaan, uang dan kepentingan. Beragama secara transaksional dan legalistis mungkin saja sebuah kenyataan yang perlu dikuatkan oleh pemimpin-pemimpin agama di Indonesia saat ini. Perilaku beragama yang transaksional dan legalistis akan membentuk dualisme sikap pada diri pelaku dan tidak menjadikannya (nilai-nilai keagamaan) sebagai cara berpikir dan berperilaku disetiap dimensi, termasuk dimensi sosial dan politik. Pada satu sisi para pemimpin publik dan para politikus akan menjadi manusia "saleh" yang menonjolkan simbol-simbol keagamaannya tapi sisi lain mereka mungkin saja menjadi Machiavellian dalam tindakan politiknya.

Beragama secara transaksional dan legalistis juga terlihat dari strategi para pemimpin publik dan politikus saat melakukan safari politik ke komunitas-komunitas agama yang dikategorikan sebagai "kantong-